

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat Batak Toba atas hutan adat di Kabupaten Samosir dalam perspektif hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Persoalan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan normatif antara jaminan hukum yang diberikan oleh instrumen hukum nasional dengan kondisi ketidakpastian hukum yang dialami masyarakat hukum adat Batak Toba secara nyata, yang bersumber dari belum terbentuknya Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Samosir sebagaimana diwajibkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif, serta teori keadilan John Rawls khususnya prinsip perbedaan sebagai landasan penilaian keadilan struktural.

Hasil penelitian antara lain pengaturan hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat Batak Toba telah memiliki landasan normatif yang progresif pada tingkat konstitusional dan nasional mulai dari UUD 1945, UU Kehutanan, UU HAM, UU PPLH, hingga Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, namun seluruhnya tidak dapat dioperasionalkan secara efektif karena bergantung pada Peraturan Daerah yang belum terbentuk. Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak masyarakat hukum adat Batak Toba dalam konteks keberadaan PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Samosir mengalami kegagalan sistemik pada kedua dimensinya akibat absennya pengakuan formal tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup empat jalur yang harus dijalankan secara simultan yaitu percepatan pembentukan Peraturan Daerah, pemanfaatan skema Perhutanan Sosial, penggunaan instrumen hukum lingkungan dan HAM, serta jalur litigasi sebagai upaya pemulihan yudisial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum yang bermakna bagi masyarakat hukum adat Batak Toba atas hutan adat di Kabupaten Samosir bukan hanya tuntutan yuridis melainkan juga tuntutan keadilan yang tidak dapat ditunda lebih lama..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat Batak Toba, Hutan Adat

ABSTRACT

This research examines the legal protection of the rights of the Batak Toba indigenous law community over customary forests in Samosir Regency from the perspective of environmental law and human rights. The fundamental issue underlying this research is the normative gap between the legal guarantees provided by national legal instruments and the legal uncertainty actually experienced by the Batak Toba indigenous law community, which stems from the absence of a Regional Regulation recognizing indigenous law communities in Samosir Regency as required by Article 67 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 on Forestry.

This research employs a normative legal research method of a prescriptive nature using three approaches namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The analytical framework applied is Philipus M. Hadjon's theory of legal protection which distinguishes between preventive and repressive legal protection, and John Rawls' theory of justice particularly the difference principle as a basis for assessing structural justice.

The research reveals three main findings. First, the legal regulation protecting the rights of the Batak Toba indigenous law community already has a progressive normative foundation at the constitutional and national levels ranging from the 1945 Constitution, the Forestry Law, the Human Rights Law, the Environmental Protection Law, to Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, however all of these cannot be effectively operationalized as they depend on a Regional Regulation that has not yet been formed. Second, both preventive and repressive legal protection for the rights of the Batak Toba indigenous law community in the context of the presence of PT Toba Pulp Lestari in Samosir Regency experiences systemic failure on both dimensions due to the absence of such formal recognition. Third, the legal remedies that can be pursued encompass four simultaneous pathways namely accelerating the formation of the Regional Regulation, utilizing the Social Forestry scheme, employing environmental law and human rights instruments, and litigation as a means of judicial recovery.

This research concludes that the fulfillment of the state's obligation to provide meaningful legal protection for the rights of the Batak Toba indigenous law community over customary forests in Samosir Regency is not only a juridical demand but also a demand for justice that can no longer be delayed.

Keywords: Legal Protection, Batak Toba Indigenous Law Community, Customary Forest